

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional					
1.1	Indikator 1.1 Nilai Ekspor Barang nasional	USD	USD300,42 miliar	USD75,11 miliar	USD48,51 miliar*	64,59%
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	Persentase	85	45	45	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	Persentase	85	45	45	100
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Persentase	85	45	45	100
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan yang Baik					

4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Persentase	92	45	45	100
-----	---	------------	----	----	----	-----

*Data realisasi nilai ekspor barang nasional yang tersedia pada Badan Pusat Statistik hanya tersedia hingga Mei 2026

Kinerja Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional ditunjukkan oleh indikator kinerja:

1. Persentase Komoditas yang Mencapai Target Pertumbuhan Ekspor Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Ekspor Barang Nasional

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor. Sasaran strategis terwujudnya kebijakan fasilitasi perdagangan dan pengembangan ekspor selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengidentifikasi penyebab isu maupun permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan ekspor. Meskipun neraca perdagangan Indonesia mencatatkan tren surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dengan nilai sebesar USD 66,85 miliar pada Triwulan I 2026, namun dalam situasi global yang tidak menentu perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak terjadi penurunan permintaan ekspor sehingga neraca perdagangan masih tumbuh positif.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 282,91 miliar atau naik 6,15 persen dibanding tahun 2024. Pada tahun 2025, ekspor dari 10 golongan barang nonmigas memberikan kontribusi 64,04% terhadap total ekspor nonmigas.

Realisasi Nilai Ekspor Barang Nasional pada periode Triwulan II 2026 dapat dilihat dari perhitungan berikut:.

$$\% \text{ capaian nilai ekspor barang} = \frac{\text{Realisasi Nilai Ekspor Barang}}{\text{Target Nilai Ekspor Barang}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja nilai ekspor barang nasional pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar USD300,42 miliar, mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, ditetapkan target kinerja per triwulan sebesar USD75,11 miliar, dengan mempertimbangkan pola historis kinerja ekspor yang umumnya mulai menunjukkan aktivitas sejak awal tahun.

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi nilai ekspor barang nasional tercatat sebesar USD48,51 miliar atau tidak mencapai target triwulanan yang telah ditetapkan sebesar USD75,11 miliar dikarenakan data yang tersedia pada Badan Pusat Statistik hanya tersedia hingga Mei 2026, sehingga persentase capaian kinerja Triwulan II 2026 mencapai 65% dari target. Ringkasan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Indikator 1.1 Nilai Ekspor Barang Nasional	Nilai	Tahunan: USD 300,42 miliar Triwulan II: USD 75,11 miliar	USD48,51 miliar	65%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target nilai ekspor barang nasional pada Triwulan II 2026 telah dilakukan serangkaian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Rapat Kerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko No.613 Tahun 2025 sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/13/D.III.M.EKON.3/04/2026.
- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Progress Kesiapan KEK Tanjung Lesung dalam Kerja Sama TCTP sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/14/D.III.M.EKON.3/04/2026.
- 3) Penyelenggaraan Rapat *Preparation for the TCTP Seminar, Business Matching, and Memorandum of Understanding (MoU) Signing* sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026 dan PED.02.01/15/D.III.M.EKON.3/04/2026 dan PED.02.01/16/D.III.M.EKON.3/04/2026.
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Kurasi proyek kerja sama dalam rangka TCTP dan Identifikasi isu strategis untuk dibahas dalam *High Level Meeting* sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/17/D.III.M.EKON.3/04/2026.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Tim Dashboard dan Penguatan Analisis Perdagangan Internasional Menggunakan Metode GTAP sesuai surat

- undangan Nomor PED.02.02/18/D.III.M.EKON.3/04/2026. Penyampaian Nota Dinas Rapat Tim PKN atas Rekomendasi Hasil Penyelidikan KKPI Terhadap Pengenaan Perpanjangan BMTP atas Impor Produk Benang Stapel dan BMTP atas Impor Produk Tirai sesuai nota dinas nomor PED.02.03/41/D.III.M.EKON.3/04/2026.
- 6) Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi Finalisasi Posisi Indonesia pada Pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia sesuai nota dinas nomor PED.02.02/42/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 7) Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Persiapan Pelaksanaan SEAFEC 2026 sesuai nota dinas nomor PED.02.02/44/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 8) Surat Penyampaian Masukan atas Draft Submission Indonesia terkait Investigasi Section 301 Amerika Serikat mengenai *Structural Excess Capacity* dan *Forced Labour* sesuai surat Nomor B/PED.02.01/16/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 9) Penyampaian Nota Dinas Partisipasi *Working Session* Semikonduktor dengan Arm Ltd sesuai nota dinas nomor PED.02.02/46/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 10) Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi terkait Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas Barang Impor Terpal Plastik Polietilena sesuai nota dinas nomor PED.02.03/48/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 11) Penyampaian Nota Dinas Rapat Harmonisasi RPermendag tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa sesuai nota dinas nomor PED.02.03/50/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 12) Surat Penyampaian Risalah Rapat Kinerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko Nomor 613 Tahun 2025 surat Nomor B/PED.02.02/24/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 13) Penyampaian Nota Dinas Rapat Pembahasan RPP Tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/53/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 14) Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Perkembangan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/21/D.III.M.EKON.3/05/2026.
 - 15) Penyampaian Nota Dinas Rapat Pleno Tim Tarif Pembahasan Kebijakan Pengenaan Bea Masuk MFN produk LPG sesuai nota dinas nomor PED.02.03/58/D.III.M.EKON.3/05/2026.
 - 16) Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pemenuhan Komoditas Peternakan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/63/D.III.M.EKON.3/05/2026.
 - 17) Penyampaian Nota Dinas *Kick-Off Meeting* Pembahasan 3 (Tiga) R-Permendag di Bidang Ekspor Komoditas SDA Strategis sesuai nota dinas nomor PED.02.01/64/D.III.M.EKON.3/05/2026.
 - 18) Penyampaian Nota Dinas Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Permendag Tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sesuai nota dinas nomor PED.02.03/69/D.III.M.EKON.3/05/2026.
 - 19) Penyampaian Nota Dinas Laporan Konsultasi Bilateral Investigasi Section 301 antara Pemerintah RI dengan USTR sesuai nota dinas nomor PED.02.02/71/D.III.M.EKON.3/05/2026.
 - 20) Penyampaian Nota Dinas Rapat Harmonisasi RPermendag tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa sesuai nota dinas nomor PED.02.03/50/D.III.M.EKON.3/04/2026.
 - 21) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengeluaran Barang dari KB ke TLDDP sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/23/D.III.M.EKON.3/06/2026.

- 22) Penyelenggaraan *Sharing Session* "Peningkatan Pembiayaan Ekspor untuk Industri Padat Karya" sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/24/D.III.M.EKON.3/06/2026.
- 23) Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi terkait Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/81/D.III.M.EKON.3/06/2026.
- 24) Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hambatan Strategis Dunia Usaha Sektor Perikanan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/89/D.III.M.EKON.3/06/2026.
- 25) Penyampaian Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Perkembangan Kebijakan Harga Bumi Gas Tertentu sesuai nota dinas nomor PED.02.03/100/D.III.M.EKON.3/06/2026.

Realisasi pada triwulan II tahun 2026 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja triwulan II dapat berhasil karena dukungan dan kerja sama yang baik antara Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dengan berbagai stakeholder terkait antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga *National Single Window*, dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang mengampu perizinan berusaha yang telah membantu dan ikut serta dalam proses penyempurnaan kebijakan dan keikutsertaan dalam kegiatan beberapa Rapat Koordinasi yang telah diselenggarakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Komoditas yang Memenuhi Target Pertumbuhan Ekspor Nasional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keppres dan Kepmenko terkait Satgas Peningkatan Ekspor Nasional	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal: 1. 23 April 2026 (Banten) 2. 30 April 2026 (Zoom) 3. 4 Mei 2026 (Kemenko Perekonomian)

			4. 26 Mei 2026 (Kemenko Perekonomian) 5. 11 Juni 2026 (Kemenko Perekonomian) 6. 30 Juni 2026 (Bali)
2.	Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 16 s.d. 24 Tahun 2025 dan perubahannya	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal: 7. 30 April 2026 (Kemendag) 8. 26 Mei 2026 (Kemenkum) 9. 9 Juli 2026 (Kemendag)
3.	Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 dan perubahannya	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal: 1. 28 April 2026 (Kemendag) 2. 25 Mei 2026 (Kemenkum) 3. 10 Juni 2026 (Kemendag)
4.	Koordinasi Uji Coba Validasi Fungsionalitas, Tata Kelola dan Proses Operasional Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA dan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE SDA	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan monev dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 7 Mei 2026 (Kemenko Perekonomian)
5.	Koordinasi Pengembangan Dashboard Ekspor dan Impor	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan monev dengan

			melibatkan K/L terkait pada tanggal: 1. 6 Mei 2026 (Bogor) 2. 25 Mei 2026 (Bappenas)
6.	Peningkatan Kapasitas K/L Anggota KNFP	Terlaksana	Telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan monev dengan melibatkan K/L terkait pada tanggal: 3. 14 April 2026 (Bandung) 4. 13 Mei 2026 (Kemendag) 5. 24 Juni 2026 (Kemendag)
7.	Rapat Koordinasi Penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Tertunda dan Digeser	Tertunda ke TW IIII mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring serta pelaksanaan monev melalui dashboard system yang tersedia dan permintaan data ke K/L terkait.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu hambatan rute pelayaran internasional, memperpanjang waktu pengiriman (*delay*), dan melonjakkan biaya pengapalan (*freight rate*).
2. Tingginya biaya energi global akibat konflik penutupan Selat Hormuz membatasi daya beli serta volume impor dari negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia.
3. Kebijakan Pemerintah mengalihkan alokasi minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini menyebabkan nilai ekspor migas turun cukup tajam dan menekan capaian ekspor nasional.

4. Kebijakan proteksionisme, termasuk penerapan tarif dan langkah-langkah non-tarif di sejumlah negara mitra dagang, meningkatkan ketidakpastian dan menghambat akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk penyelesaian hambatan perdagangan dan mempercepat implementasi perjanjian perdagangan internasional (*Free Trade Agreement*) bersama kementerian teknis terkait;
2. Diperlukan koordinasi penyelarasan aturan Larangan Terbatas (Lartas) antar-Kementerian/Lembaga teknis untuk menghapus tumpang tindih perizinan yang menghambat proses ekspor dan impor.

2

Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor;
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor; dan
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor

Latar Belakang

Peningkatan ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan ekspor salah satunya diarahkan melalui penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Persentase keberhasilan koordinasi menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan lintas sektor, mengingat tantangan ekspor saat ini bukan hanya bersumber dari faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, hambatan tarif dan non tarif, maupun ketidakpastian geopolitik, tetapi juga dari faktor internal berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur logistik, dan belum optimalnya integrasi data perdagangan.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor				
		Tahunan:		
		85%		
	Presentase		45%	100%
		Triwulan II: 45%		

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor pada Triwulan II 2024 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Penyampaian Nota Dinas Rapat Teknis Persiapan Implementasi Perubahan Kelima Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Untuk Produk Minyak Mentah dan Kondensat sesuai nota dinas nomor PED.02.01/57/D.III.M.EKON.3/04/2026.
2. Penyelenggaraan Pembahasan Permasalahan Ekspor Industri Baja Indonesia sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/19/D.III.M.EKON.3/05/2026.
3. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan dan Strategi Peningkatan Ekspor Kemasan ke Turkiye dan Update Perkembangan Indonesia - Turkiye CEPA sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/22/D.III.M.EKON.3/05/2026.
4. Surat Masukan terkait Penyelidikan AD/CVD Produk Solar Panel oleh USDOC sesuai surat Nomor B/PED/02.01/23/D.III.M.EKON.3/04/2026.
5. Surat Permintaan Eksportir minyak atsiri dalam rangka analisis Perdagangan Bilateral Indonesia dan Prancis sesuai surat nomor B/PED.02.01/28/D.III.M.EKON.3/05/2026.
6. Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi Teknis Permasalahan Ekspor Industri Baja Indonesia sesuai nota dinas nomor PED.02.01/62/D.III.M.EKON.3/05/2026.
7. Penyampaian Nota Dinas Sosialisasi Permendag Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sesuai nota dinas nomor PED.02.03/70/D.III.M.EKON.3/05/2026.
8. Surat Penyampaian Tanggapan Permohonan Penelaahan dan Konfirmasi atas Jawaban *Supplemental Questionnaire* terkait *Additional Input Suppliers* pada Penyelidikan Countervailing Duty (CVD) Produk *Certain*

Fatty Acid (CFA) asal Indonesia oleh Otoritas Amerika Serikat sesuai surat nomor B/PED.02.01/34/D.III.M.EKON.3/06/2026.

9. Penyampaian Nota Dinas Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hambatan Strategis Dunia Usaha Sektor Perikanan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/73/D.III.M.EKON.3/06/2026.
10. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar sesuai nota dinas nomor PED.02.01/94/D.III.M.EKON.3/06/2026.
11. Penyampaian Nota Dinas Evaluasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sesuai nota dinas nomor PED.02.03/101/D.III.M.EKON.3/06/2026.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Ekspor	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu hambatan rute pelayaran internasional, memperpanjang waktu pengiriman (*delay*), dan melonjakkan biaya pengapalan (*freight rate*).

2. Tingginya biaya energi global akibat konflik penutupan Selat Hormuz membatasi daya beli serta volume impor dari negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia.
3. Kebijakan Pemerintah mengalihkan alokasi minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini menyebabkan nilai ekspor migas turun cukup tajam dan menekan capaian ekspor nasional.
4. Kebijakan proteksionisme, termasuk penerapan tarif dan langkah-langkah non-tarif di sejumlah negara mitra dagang, meningkatkan ketidakpastian dan menghambat akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk penyelesaian hambatan perdagangan dan mempercepat implementasi perjanjian perdagangan internasional (*Free Trade Agreement*) bersama kementerian teknis terkait;
2. Diperlukan koordinasi penyelarasan aturan Larangan Terbatas (Lartas) antar-Kementerian/Lembaga teknis untuk menghapus tumpang tindih perizinan yang menghambat proses ekspor dan impor.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.2.Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor	Presentase	Tahunan: 85% Triwulan II: 45%	45%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian

Impor pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Tim PKN atas Rekomendasi KPPI terhadap Pengenaan Perpanjangan BMTP atas Impor Produk Benang Stapel dan BMTP atas Impor Produk Tirai sesuai nota dinas nomor PED.02.03/41/D.III.M.EKON.3/04/2026.
2. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pleno Tim Tarif Terkait Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya serta Perpanjangan Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Artifisial sesuai nota dinas nomor PED.02.03/41/D.III.M.EKON.3/04/2026.
3. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi terkait Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan atas Barang Impor Terpal Plastik Polietilena sesuai nota dinas nomor PED.02.03/48/D.III.M.EKON.3/04/2026.
4. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Harmonisasi RPermendag tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa sesuai nota dinas nomor PED.02.03/50/D.III.M.EKON.3/04/2026.
5. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan RPP tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (TPTATI) sesuai nota dinas nomor PED.02.03/53/D.III.M.EKON.3/04/2026 dan PED.02.03/54/D.III.M.EKON.3/04/2026.
6. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pleno Tim Tarif Pembahasan Kebijakan Pengenaan Bea Masuk MFN produk LPG sesuai nota dinas nomor PED.02.03/58/D.III.M.EKON.3/05/2026.
7. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pleno Tim Tarif Pembahasan Kebijakan Insentif Bea Masuk produk LPG dan Bahan Baku Plastik sesuai nota dinas nomor PED.02.03/59/D.III.M.EKON.3/05/2026.
8. Penyampaian Nota Dinas Laporan Sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 (Ketentuan Impor Gandum Pakan, Bungkil Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Buah Pir dan Beras Pecah Untuk Keperluan Pakan) sesuai nota dinas nomor PED.02.03/61/D.III.M.EKON.3/05/2026.
9. Penyampaian Nota Dinas Laporan Public Hearing dalam rangka Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin sesuai nota dinas nomor PED.02.03/68/D.III.M.EKON.3/05/2026.
10. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Penyusunan RPermendag tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun

2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sesuai nota dinas nomor PED.02.03/69/D.III.M.EKON.3/05/2026.

11. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Rancangan Peraturan Pemerintah Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan sesuai nota dinas nomor PED.02.03/74/D.III.M.EKON.3/06/2026.
12. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi Penurunan Tarif Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik sesuai nota dinas nomor PED.02.03/75/D.III.M.EKON.3/06/2026.
13. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Tindak Lanjut Pokja Pemenuhan Kebutuhan Komoditas Peternakan sesuai nota dinas nomor PI.02.02/77/D.III.M.EKON.3/06/2026.
14. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi terkait Penyelidikan Tindakan Anti Dumping atas Impor Produk *Polypropylene* (PP) *Homopolymer* sesuai nota dinas nomor PI.02.02/80/D.III.M.EKON.3/06/2026.
15. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi terkait Penguatan Industri Alat Farmasi dan Kesehatan sesuai nota dinas nomor PI.02.03/81/D.III.M.EKON.3/06/2026.
16. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Perumusan Draft RPMK MRO, LPG, dan Bahan Baku Plastik dalam satu PMK (RPMK Perubahan Ketiga PMK 26/2022) sesuai nota dinas nomor PED.02.03/83/D.III.M.EKON.3/06/2026.
17. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Pengenaan BMTP atas Impor Produk LLDPE sesuai nota dinas nomor PED.02.03/88/D.III.M.EKON.3/06/2026.
18. Penyampaian Undangan Rapat Koordinasi Pengeluaran Barang dari KB ke TLDDP sesuai undangan nomor PED.02.03/95/D.III.M.EKON.3/06/2026.
19. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Permendag Nomor 9 Tahun 2026 sesuai nota dinas nomor PI.02.02/97/D.III.M.EKON.3/06/2026.
20. Penyampaian Surat Sesmenko Bidang Perekonomian a.n. Menko Bidang Perekonomian kepada Menteri Perdagangan Perihal Pertimbangan Atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan BMAD PP *Homopolymer* sesuai surat nomor PED.02.03/148/D.III.M.EKON/06/2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengendalian Impor			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melakukan identifikasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Impor	Terlaksana	2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat, monitoring dan evaluasi serta kegiatan lain baik dengan pemerintah maupun asosiasi pelaku usaha yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

5. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi;
6. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor;
7. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang;
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom;
3. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus dengan para pemangku kepentingan.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Fasilitas Perdagangan target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-4.2.Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Presentase	Tahunan: 85% Triwulan II: 45%	45%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Kerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko 613 Tahun 2025 sesuai dengan surat undangan nomor PED.02.02/13/D.III.M.EKON.3/04/2026.
2. Pelaksanaan Rapat Tim Dashboard dan Penguatan Analisis Perdagangan Internasional Menggunakan Metode GTAP sesuai dengan surat undangan nomor PED.02.02/18/D.III.M.EKON.3/04/2026.
3. Penyampaian Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi Posisi Indonesia pada Pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/42/D.III.M.EKON.3/04/2026.

4. Penyampaian Laporan Rapat Persiapan Pelaksanaan SEAFEC 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/44/D.III.M.EKON.3/04/2026.
5. Penyampaian Laporan Hasil Partisipasi Working Session Semikonduktor dengan Arm Ltd pada 10 April 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/46/D.III.M.EKON.3/04/2026.
6. Penyampaian Laporan Rapat Koordinasi Pelaksanaan SEAFEC 2026 bersama Pemerintah Amerik Serikat pada 10 April 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/47/D.III.M.EKON.3/04/2026.
7. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Persiapan SEAFEC 2026 pada 22 April 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/51/D.III.M.EKON.3/04/2026.
8. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Perkembangan Rencana Pelaksanaan SEAFEC 2026 pada 28 April 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/52/D.III.M.EKON.3/04/2026.
9. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko Nomor 613 Tahun 2025 pada 8 Juni 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/67/D.III.M.EKON.3/06/2026.
10. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Tim Dashboard Monitoring Ekspor Impor dan Penguatan Analisis Perdagangan Menggunakan GTAP/GEMPACK pada 8 Juni 2026 sesuai dengan nota dinas nomor PED.02.02/87/D.III.M.EKON.3/06/2026.
11. Penyampaian Risalah Rapat Kinerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko Nomor 614 Tahun 2025 pada 14 April 2026 sesuai dengan surat nomor B/PED.02.02/24/D.III.M.EKON.3/04/2026.
12. Penyampaian Pembaruan Data Kepemilikan Hak Akses Enquiry Point pada website KNFP sesuai dengan surat nomor B/PED.02.02/29/D.III.M.EKON.3/06/2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Terlaksana	3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya komitmen kementerian/lembaga teknis dalam mengintegrasikan sistem perizinan sektoral ke dalam skema *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) dan *Dashboard Monitoring* ekspor-impor, sehingga proses simplifikasi prosedur masih berjalan parsial.
2. Terhambatnya proses pengambilan keputusan strategis dalam penyesuaian regulasi tata niaga akibat asimetri pemahaman dan ego sektoral antar-pemangku kepentingan terkait prosedur pemenuhan kewajiban perdagangan di lapangan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan eskalasi koordinasi tingkat tinggi untuk mendorong pemenuhan *user* akses serta validasi pembaruan data secara berkala dari tiap K/L pengampu perizinan pada *Dashboard Monitoring* ekspor dan impor.
2. Diperlukan sosialisasi dan asistensi teknis berkelanjutan melalui Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) guna menyamakan persepsi regulasi dan mempercepat implementasi pemotongan birokrasi prosedur perdagangan.
3. Mengoptimalkan fleksibilitas pertemuan melalui media virtual (*Zoom*) atau penyediaan forum luar kantor yang representatif demi menjaga kesinambungan pembahasan teknis penyederhanaan prosedur.

3

Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kerja yaitu Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Latar Belakang

Peningkatan ekspor menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan ekspor salah satunya diarahkan penguatan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Keberhasilan koordinasi menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan lintas sektor, mengingat tantangan ekspor saat ini bukan bersumber dari faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, hambatan dan non tarif, maupun ketidakpastian geopolitik, tetapi juga dari faktor berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur logistik, dan optimalnya integrasi data perdagangan.

Proses Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Ekspor target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Tw II	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Indeks	Tahunan: 3 dari 4 (Baik) Triwulan II: 3 dari 4	20%	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diproyeksikan dapat dilaksanakan dan memperoleh nilai yang diharapkan pada triwulan III 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Terlaksana	Telah dilakukan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang akan dilaksanakan pada triwulan II 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya **mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan**, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Tahun 2026 adalah sebesar 92%. Target tersebut dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Adapun target triwulan II 2026 adalah sebesar 40% dengan target capaian telah tersusunnya beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 43,47% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan	Persentase	Tahunan: 92% TW II: 45%	45%	100% (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan *cascading direct* dari Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Dimana telah dilakukan penyusunan beberapa dokumen terkait perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan implementasi Srikandi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi RB General yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam penyusunan beberapa kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah terselesaikannya penyusunan dokumen laporan kinerja triwulanan II level eselon II.
2. Telah dilakukan penyusunan revisi Renja 2026.
3. Telah dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan di Keasdepan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Sampai dengan akhir triwulan II Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan II, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II sesuai waktu yang ditentukan
2.	Penyusunan Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Revisi Renja tahun 2026 sesuai waktu yang ditentukan
3.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring implementasi dan optimalisasi penggunaan Srikandi dalam persuratan di unit keasdepan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya **mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan**, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

Jakarta, Juni 2026

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan
dan Pengembangan Ekspor


Ekko Harjanto